

**ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TEBING TINGGI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
(TINJAUAN TERHADAP PENGUATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PADA
KELURAHAN BANDAR UTAMA, KOTA TEBING TINGGI)**

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

DEOVANY SASKIA PURBA TAMBAK
NPM : 71230123173

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara



MAGISTER ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TEBING TINGGI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
(TINJAUAN TERHADAP PENGUATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PADA
KELURAHAN BANDAR UTAMA, KOTA TEBING TINGGI**

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

DEOVANY SASKIA PURBA TAMBAK
NPM : 71230123173

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Medan, November 2025

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum

Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep	27
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian.....	37
1. Spesifikasi Penelitian	37
2. Metode Pendekatan	39
3. Alat Pengumpulan Data	40
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	42
5. Analisis Data	44
BAB II : PENGATURAN HUKUM KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA TEBING TINGGI DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH.....	46

A. Landasan Yuridis Lembaga Kemasyarakatan dalam Sistem Pemerintahan Daerah	46
B. Kedudukan Struktural Lembaga Kemasyarakatan dalam Sistem Pemerintahan Kelurahan Bandar Utama	62
C. Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	77
BAB III : TINGKAT KEBERHASILAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BANDAR UTAMA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	92
A. Indikator dan Parameter Keberhasilan Program Pembangunan	92
B. Evaluasi Implementasi Program Pembangunan di Kelurahan Bandar Utama	106
C. Analisis Yuridis Tingkat Keberhasilan dalam Sistem Pemerintahan Daerah	119
BAB IV : HAMBATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	130
A. Identifikasi Hambatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat	130
B. Analisis Hukum Tata Negara terhadap Problematika yang Dihadapi	138
C. Alternatif Solusi Hukum untuk Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi	146
BAB V : PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Addink, H., *Good Governance: Concept and Context*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- Anugrah Pradana, S., *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Anwar, U. A. A., & Pustaka, D., *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*, Detak Pustaka, 2025.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Arliman, L., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Baik, P. Y., *Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara*, 2024.
- Hay, C., *The State Theory and Issues*, Palgrave Macmillan, London, 2006.
- Hidayat, A., *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba Baru, Jakarta, 2017.
- Huda, M., *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ibrahim, J., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Indrati, M. F., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Edisi Revisi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Kartasasmita, G., *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CDIS, Jakarta, 1996.
- Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Kranenburg, R., & Sabaroedin, T. B., *Ilmu Negara Umum (Cetakan Kesebelas)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Labolo, M., Memahami Ilmu Pemerintahan, PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2023.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Moenta, A. P., & Pradana, S. A., Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Nurcholis, H., Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Rauf, R., & Munaf, Y., Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia, Zanaf Publishing, 2015.

Singarimbun, M., & Effendi, S., Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1997.

Soekanto, S., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 2011.

Soemitro, R. H., Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2018.
Suaib, M. S., Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit Adab, 2023.

Syadzily, T. A. H., Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2020.

Tjandra, R., Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Whimster, S., Rationality and Modernity: Max Weber, 2014.

Yulviani, D., Sosiologi Hukum, Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

C. Jurnal/Artikel/Disertasi/Tesis

Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. H. J., & Barki, K., "Implementasi Pendekatan Community Empowerment untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah", *Journal of Scientech Research and Development*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Anggriani, J., "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 3, 2011.

Arnstein, S., "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4, 1969.

Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S., "Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi", *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 2, 2021.

- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D., "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 5, No. 4, 2024.
- Boediningsi, W., & Rusmaya, E., "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Masyarakat Sosial", *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Dasril, M., "Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak)", *Jurnal Dialektika*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A., "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis", *Heliyon*, Vol. 7, No. 8, 2021.
- Effendi, W. R., "Konsep Welfare State di Indonesia", *Jurnal Trias Politika*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Faturrahman, B. M., "Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Publisia*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Fernando, Z. J., "Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Majalah Keadilan*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Fina, V. M., "Peran Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)", *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 2018.
- Firdaus, I., "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019.
- Fitriya, N. I., *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Gedeona, H. T., "Tata Kelola Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan (Studi Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Kompleksitasnya di Kota Cimahi)", *Jurnal Ilmu Administrasi*:

Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol. 12, No. 1, 2015.

Hafizhullah, M. A., Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Hariyanto, H., "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2020.

Hasrullah, "Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja", *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L., "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Jeddawi, M., "Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan", *Jurnal Pallangga Praja*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W., "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 80, 2019.

Khairi, M., "Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum", *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Lekipiouw, S. H., "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", *Sasi*, Vol. 26, No. 4, 2020.

Likubua, R., Fitra, N., & Saleh, A., "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa", *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Lubis, A., "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan", *Jurnal Tabularasa*, Vol. 6, No. 2, 2009.

Lukow, S., "Eksistensi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 5, 2013.

- Mahmudah, H., "Tinjauan Hukum atas Eksistensi dan Legalitas Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima", *NALAR: Journal of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Margayaningsih, D. I., "Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah", *Publiciana*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Mashur, D., "Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Munawwarah, T., Kholizah, N. A., & Maidiana, "Analisis Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Tim Pengelola Pendidikan di Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu Suhairiyah", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023.
- Mustamu, J., "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Sasi*, Vol. 17, No. 2, 2011.
- Pajriani, E., *Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah*, Modul Pembelajaran PPKN, Kemendikbud, 2020.
- Patarai, M. I., "Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan", *Jurnal De La Macca*, Vol. 1, 2020.
- Pitaloka, Y., *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang*, Repository FISIP UNSAP, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Poerwati, T., & Imaduddina, A. H., "Keberhasilan Pembangunan Desa Ditinjau dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa", *Pawon: Jurnal Arsitektur*, Vol. 3, No. 02, 2019.
- Prasojo, E., "People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2004.
- Prasetyo, B., "Kajian Teoritik Karakter Kebijakan Publik", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2012.

- Purwandi, A., "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah", *Jurnal Perspektif*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Raharja, S. U. J., "Paradigma Governance dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai", *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No. 2, 2011.
- Rumata, V. M., "Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20, No. 1, 2017.
- Saputra, R., & Emovwodo, S. O., "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Sari, F. R., & Adityo, R. D., "Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W., "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)", *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Siwiyanti, L., Amal, M. K., & Lestari, N. A., "Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Sugiman, S., "Pemerintahan Desa", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Suyatno, S. S., "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia", *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1 Juni, 2023.
- Timotius, R., "Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Winata, S. P., & Muchid, M., *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016*, Disertasi, Riau University, 2018.

D. Sumber Lain (Wawancara)

Elmina Miranda S.E, Wawancara Pribadi, Lurah Bandar Utama
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, 18 September 2025

Nasib Pujiyanto, Wawancara Pribadi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tebing Tinggi, 15 September 2025.

Siti Aminah, Wawancara Pribadi, Warga Kelurahan Bandar Utama,
23 September 2025.